



**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

**Ika Tumiarshih
NIM 150810101204**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh :

**Ika Tumiarsih
NIM 150810101204**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Wiwik Indayani dan alm. Ayahanda Jubriyanto tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Saudaraku Mohammad Ashari yang telah menjadi salah satu penyemangat bagi penulis.
3. Guru-guru sekolahku dari sekolah Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”
(Terjemahan QS. Al-Baqarah: 286)

Lebih baik bertempur dan kalah daripada tidak pernah bertempur sama sekali.
(Arthur Hugh Clough)

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.
(Aldus Huxley)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ika Tumiarsih

NIM : 150810101204

Judul : Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang benar.

Demikian pernyataan yang saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jember, 11 Maret 2019

Yang menyatakan,

Ika Tumiarsih
NIM. 150810101204

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TIMUR**

Disusun Oleh :

Ika Tumiarsih
NIM 150810101204

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama

: Dra. Nanik Istiyani, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota

: Aisah Jumiati, S.E, M.P

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur

Nama Mahasiswa : Ika Tumiarsih
NIM : 150810101204
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Tanggal Persetujuan : 11 Maret 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Nanik Istiyani, M.Si
NIP. 196101221987022002

Aisah Jumiati, S.E, M.P
NIP.196809261994032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindartin.M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ika Tumiarsih
NIM : 150810101204
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Prodi : Ekonomi Pembangunan

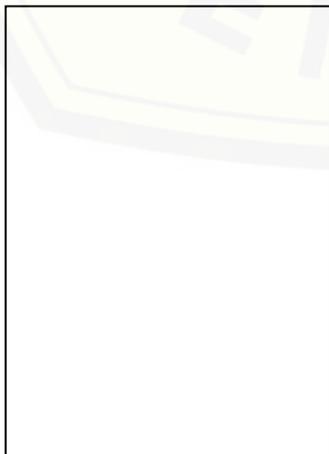
Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. I Wayan Subagiarta, M.Si. (.....)
NIP.19604121987021001
2. Sekretaris : Dr. Rafael Purtomo S.M.Si. (.....)
NIP. 195810241988031001
3. Anggota : Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc. (.....)
NIP. 195608311984031002

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M, Ak.
NIP 19710727 199512 1001

*ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TIMUR*

Ika Tumiarsih

*Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis,*

Universitas Jember

ABSTRAK

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan melalui pengembangan dibidang perekonomian. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Jenis penelitian adalah *explanatory reseach* yang bertujuan mengetahui hubungan antar variabel dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan *Fixed Effect* dan dikaitkan dengan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh tidak signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran

*ANALYSIS OF THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, INFLUENCE
INCOME DISTRIBUTION, AND UNEMPLOYMENT RATE TO THE POVERTY
RATE IN EAST JAVA*

Ika Tumiarsih

*Development Economics Departemen, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

One of the goals of national development is to create prosperity and prosperity through the development of the economy. One of the national development goals is to reduce poverty. This type of research is explanatory research which aims to determine the relationship between variables where the variables used in this study are Economic Growth, Income Distribution Inequality, and Unemployment Rate to the Poverty Rate in East Java. The method used in this study is panel data with the Fixed Effect approach and associated with descriptive analysis. Based on the results of the study showed that the District / City economic growth variable has a significant positive effect on poverty rates in East Java, the inequality of income distribution has no significant positive effect on poverty rates in East Java and the unemployment rate has a significant positive effect on poverty rates in East Java.

Keywords: Poverty Rate, Economic Growth, Influence Income Distribution, And Unemployment Rate

RINGKASAN

Pembangunan khususnya bidang ekonomi ditempatkan dalam urutan pertama dari seluruh aktivitas pembangunan nasional. Menurut Simatupang dan Saktiyanu (2003), pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satunya dengan mengarahkan pembangunan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan melalui pengembangan dibidang perekonomian. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan yang bersifat multidimensional dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir dkk.,2008).

Penelitian ini menggunakan penelitian *explanatory reseach* yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Tempat dan waktu dilaksanakan di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2008-2017. Adapun sumber data yang diambil yaitu diperoleh dari BPS Jawa Timur, buku literature, jurnal, penelitian terdahulu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Tingkat Pengangguran dengan variabel terikat Tingkat

Kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel dengan menggunakan alat analisis Eviews 9.5. Data panel merupakan data gabungan dari data *cross section dan time series*. Penelitian ini menggunakan metode *fixed effect model*. Uji statistik menggunakan koefisien determinasi (R^2), pengujian simultan (Uji F), dan pengujian parsial (Uji t), dan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar 0.246401 serta nilai probabilitasnya sebesar 0.0142 atau lebih kecil dari *P-value* 0,05. Hal ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 1 persen per tahun maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0.246401 persen. Ketimpangan Distribusi Pendapatan memiliki nilai koefisien sebesar 0.045054 serta nilai probabilitasnya sebesar 0.6234 atau lebih besar dari *P-value* 0,05, artinya ketimpangan distribusi pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat Pengangguran memiliki nilai koefisien sebesar 0.615712 serta nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari *P-value* 0,05. Hal ini berarti apabila tingkat pengangguran mengalami kenaikan 1 persen per tahun maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0.615712 persen.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan sedangkan Ketimpangan Distribusi Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur 2008-2017.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur”*. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran, maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dra. Nanik Istiyani, M.Si selaku dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Aisah Jumiati, S.E, M.P selaku dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., AK.,CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Dr. Sebastiana Viphindartin.M.Kes. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan.
5. Dr. Siti Komariyah, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) selama kuliah terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terimakasih atas bimbingan dan pelayanannya selama penulis menjadi mahasiswa.

7. Ibunda Wiwik Indayani dan Ayahanda Jubriyanto yang telah membimbing dari kecil hingga dewasa, terimakasih banyak atas segala kasih sayang, dukungan, dan doa yang selalu beliau panjatkan teruntuk anak-anaknya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.
8. Nenek Siyana yang memberikan semangat dan doa yang selalu beliau panjatkan.
9. Kakak dan Adikku, Eko Susanto dan Mohammad Ashari terimakasih sudah menjadi pengingat dan penghibur disaat penulis mulai lelah akan semua tugas yang akan diselesaikan.
10. Teman-teman KKN 307 Desa Krobungan, Probolinggo. Terimakasih untuk 45 harinya yang sangat berkesan.
11. Terimakasih kepada sahabat tercinta yang telah mengisi hari-hari dan membantu memberi dorongan akan kelulusan Penulis Riya, Galuh, Risky, Rizza, Reza, Nike, Fera, Dimas, Feby, Diana, Sityul, Atha, dan Fitri, terimakasih atas motivasinya.
12. Teman-teman ilmu ekonomi studi pembangunan angkatan 2015 terimakasih yang telah memberikan dukungan dan doanya.
13. Terimakasih kepada kakak tingkat Muhammad Yasin dan Putri Dwi A. yang telah memberikan arahan dan saran selama penyusunan skripsi ini berlangsung.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amin.

Jember, 11 Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Konsep Kemiskinan.....	9
2.1.2 Bentuk dan Jenis Kemiskinan	11
2.1.3 Teori Ragnar Nurkse (<i>Vicious Circle of Poverty</i>)	14
2.1.4 Indikator Kemiskinan	16
2.1.5 Kriteria Kemiskinan.....	17
2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi	18
2.1.7 Ketimpangan Distribusi Pendapatan	21
2.1.8 Pengangguran.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Konseptual	32
2.4 Hipotesis Penelitian	33

BAB 3. METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Rancangan Penelitian	34
3.1.1 Jenis Penelitian	34
3.1.2 Unit Analisis.....	34
3.1.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.2 Metode Analisis	34
3.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda	34
3.2.2 <i>Common Effect Model</i>	36
3.2.3 <i>Fixed Effect Model</i>	36
3.2.4 <i>Random Effect Model</i>	37
3.3 Uji Spesifikasi Model	37
3.3.1 Uji <i>Chow</i>	37
3.3.2 Uji <i>Hausman</i>	38
3.4 Uji Statistik.....	38
3.4.1 Uji F	38
3.4.2 Uji t	39
3.4.3 Koefisien Determinasi	40
3.5 Uji Asumsi Klasik.....	40
3.5.1 Uji multikolinearitas	40
3.5.2 Uji Heteroskedastisitas	41
3.5.3 Uji Normalitas	41
3.6 Definisi Operasional Variabel	42
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	44
4.1.1 Keadaan Geografis	44
4.1.2 Kondisi Penduduk Jawa Timur	45
4.2 Gambaran Variabel Penelitian.....	46
4.2.1 Kondisi Tingkat Kemiskinan Jawa Timur	46
4.2.2 Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur	48
4.2.3 Kondisi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Jawa Timur	49
4.2.4 Kondisi Tingkat Pengangguran Jawa Timur.....	51
4.3 Hasil dan Analisis Data.....	53
4.3.1 Pemilihan Model Estimasi Data Panel.....	53
4.3.2 Analisis Regresi Data Panel	55

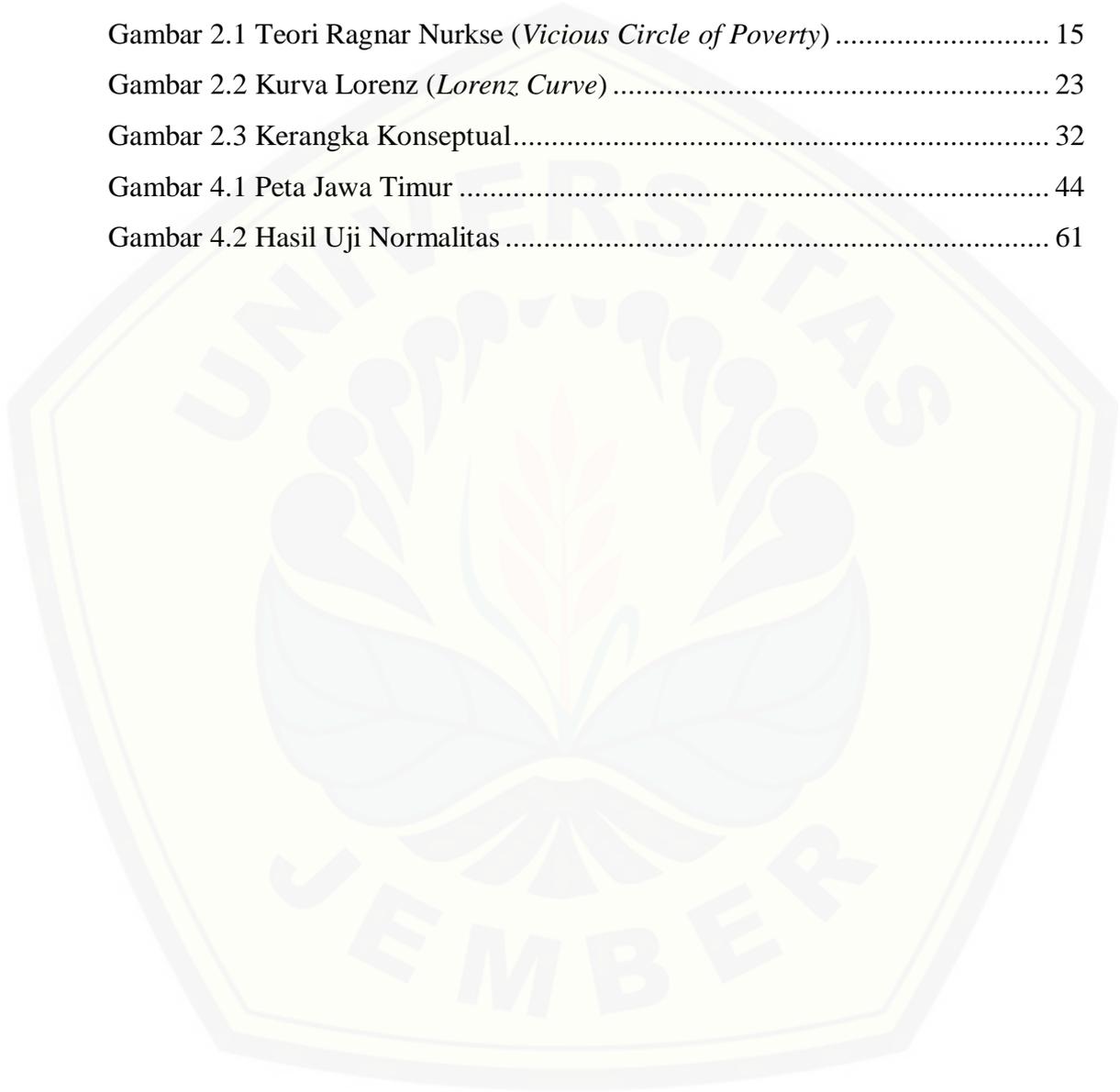
4.4 Uji Statistik	57
4.4.1 Uji F (secara simultan).....	57
4.4.2 Uji t (secara parsial).....	58
4.4.3 Koefisien Determinasi (uji R)	59
4.5 Uji Asumsi Klasik	59
4.5.1 Uji Multikolinieritas	59
4.5.2 Uji Heteroskedastisitas	60
4.5.3 Uji Normalitas	61
4.5.4 Hasil Estimasi <i>Individual Effect</i>	62
4.6 Pembahasan	64
4.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan	64
4.6.2 Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan ...	65
4.6.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	67
BAB 5. PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa, 2008-2017(Juta Jiwa).....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 4.1 Indikator Kependudukan Jawa Timur Tahun 2008-2017.....	46
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Miskin Tertinggi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur	47
Tabel 4.3 Persentase Penduduk Miskin Terendah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur	47
Tabel 4.4 Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur	49
Tabel 4.5 Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Terendah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur	49
Tabel 4.6 Persentase Gini Rasio Tertinggi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur	51
Tabel 4.7 Persentase Gini Rasio Terendah menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur	51
Tabel 4.8 Persentase TPT Tertinggi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur	52
Tabel 4.9 Persentase TPT Terendah menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur	52
Tabel 4.10 Hasil Uji Chow	54
Tabel 4.11 Hasil Uji Hausman.....	55
Tabel 4.12 Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i>	55
Tabel 4.13 Hasil Uji F.....	57
Tabel 4.14 Hasil Uji t.....	58
Tabel 4.15 Hasil Uji R ²	59
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas.....	60
Tabel 4.17 Hasil Uji Heteroskedasitas(Uji <i>White</i>).....	60
Tabel 4.18 Hasil Estimasi <i>Individual Effect</i>	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 2008–2017 ...	3
Gambar 1.2 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur, 2008–2017	5
Gambar 2.1 Teori Ragnar Nurkse (<i>Vicious Circle of Poverty</i>)	15
Gambar 2.2 Kurva Lorenz (<i>Lorenz Curve</i>)	23
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual.....	32
Gambar 4.1 Peta Jawa Timur	44
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	61



DAFTAR LAMPIRAN

A.1. Data Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2017.....	72
A.2. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2017.....	73
A.3. Data Gini Rasio Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2017	74
A.4. Data TPT Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2008-2017.....	75
B. Hasil Analisis Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i>	76
C.1. Hasil Chow (Chow - test)	77
C.2. Hasil Uji Hausman (Hausman - Test).....	77
D.1. Hasil Uji Multikolinearitas	78
D.2. Hasil Uji Normalitas.....	78
D.3. Hasil Uji Heterokedasitas	78
E. Hasil Estimasi Individual Effect di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017	79

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan khususnya bidang ekonomi ditempatkan dalam urutan pertama dari seluruh aktivitas pembangunan nasional. Menurut Simatupang dan Sakttyanu (2003), pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satunya dengan mengarahkan pembangunan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan melalui pengembangan dibidang perekonomian. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan yang bersifat multidimensional dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan akses informasi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir dkk.,2008).

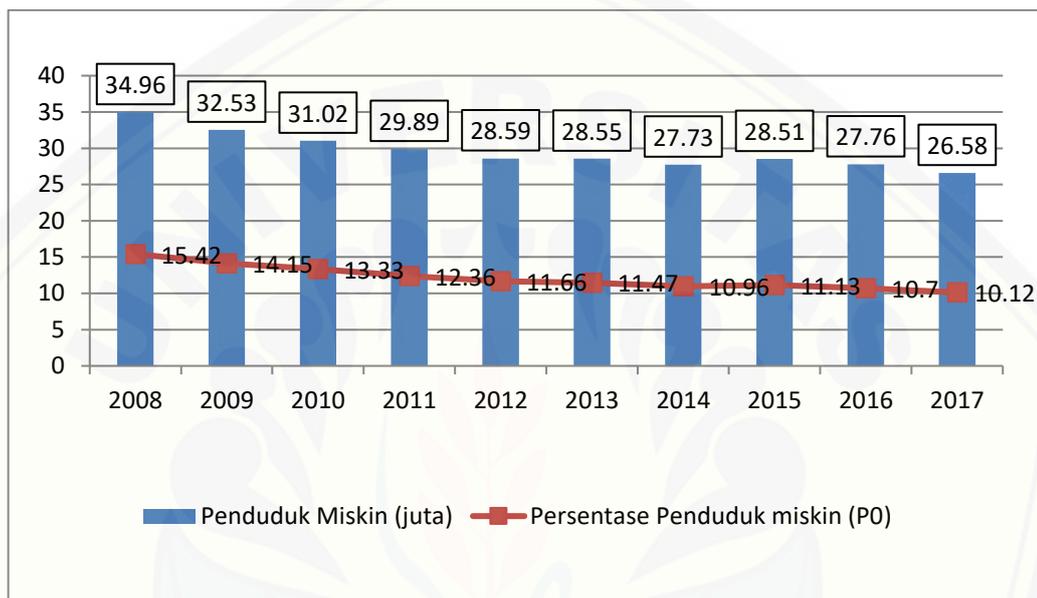
Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Chambers menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci *deprivation trap* memiliki lima dimensi, yaitu kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi

situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis (Suryawati, 2005). Menurut Badan Pusat Statistik seseorang masuk dalam kriteria miskin jikapendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang merupakan dasar perhitungan jumlah penduduk miskin ditentukan dari pendapatan (total pendapatan per bulan) kurang dari atau sama dengan Rp 350.000,- (BPS,2008:17).

Menurut Kuncoro (1997:134), Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Lingkaran kemiskinan adalah satu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia(SDM) menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi modal. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah. Kekurangan modal akan menyebabkan adanya keterbelakangan dan seterusnya.

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh hampir semua negara, dan antar daerah dalam suatu negara, terutama daerah yang padat penduduknya dan daerah yang memiliki sumber daya alam yang terbatas. Termasuk di Indonesia masalah kemiskinan masih menjadi masalah utama yang harus diatasi. Berbagai kebijakan serta program pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintah pada intinya bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Indonesia relatif masih sangat besar. Berdasarkan data BPS (2017), Secara umum sejak 2008-2017, tingkat kemiskinan di Indonesia yang disajikan dalam gambar 1.1 mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada tahun 2015. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan. Selain timbulnya masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Tingginya kemiskinan akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi meningkat, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi suatu negara.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 2008–2017

Pembangunan di Indonesia masih tidak merata antara provinsi satu dengan yang lainnya, bahkan di wilayah terpencil masih ada yang belum tersentuh oleh pembangunan dari Pemerintah. Jumlah penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Siregar dan Wahyuniarti, 2008). Hal ini dikarenakan Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi jika di bandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017) yang disajikan dalam Tabel 1.1, provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2008-2017 ialah Provinsi Jawa timur yakni sebesar 4405,47 juta jiwa. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang gencar melaksanakan pengentasan

kemiskinan. Oleh karena itu, provinsi yang mengalami penurunan angka kemiskinan yang paling progresif selama tahun 2008-2017 terjadi di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 2246.02 juta jiwa. Jawa Timur dikenal sebagai pusat kawasan timur di Pulau Jawa dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,61% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional. Namun hal itu tidak menghindarkan Provinsi Jawa Timur dari masalah kemiskinan yang tinggi karena disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan disetiap daerah.

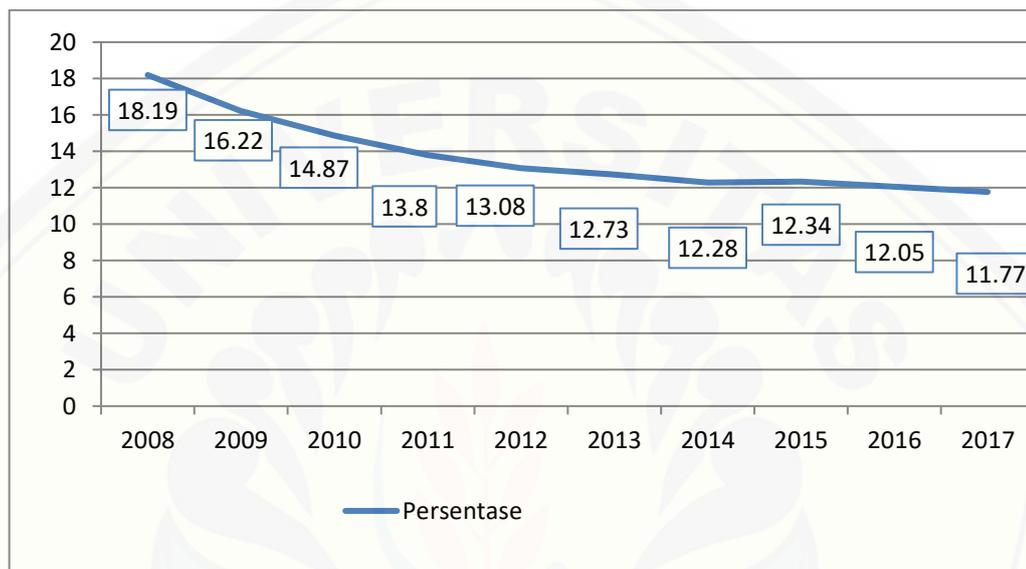
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa, 2008-2017(Juta Jiwa)

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DKI Jakarta	379.6 0	323.1 7	312.1 8	363.4 2	366.7 7	375.7 0	412.7 9	368.6 7	385.8 4	393.1 3
Jawa Barat	5322. 40	4983. 57	4773. 72	4648. 63	4421. 48	4382. 65	4238. 96	4485. 65	4168. 11	3774. 41
Jawa Tengah	6189. 60	5725. 69	5369. 16	5107. 36	4863. 41	4704. 87	4561. 82	4505. 78	4493. 75	4197. 49
DI Yogyakarta	616.3 0	585.7 8	577.3 0	560.8 8	562.1 1	535.1 8	532.5 9	485.5 6	488.8 3	466.3 3
Jawa Timur	6651. 30	6022. 59	5529. 30	5356. 21	4960. 54	4865. 82	4748. 42	4775. 97	4638. 53	4405. 27
Banten	816.7 0	788.0 7	758.1 6	690.4 9	648.2 5	682.7 1	649.1 9	690.6 7	657.7 4	699.8 3
Jumlah	19975 .9	18428 .87	16800 .84	16726 .99	15822 .56	15546 .93	15143 .77	15312 .3	14832 .8	13936 .46

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Berdasarkan Data BPS (2017), Secara umum pada periode 2008-2017 tingkat kemiskinan di Jawa Timur yang disajikan dalam Gambar 1.2 mengalami penurunan, kecuali pada 2015. Peningkatan persentase kemiskinan pada 2015, antara lain dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah melaksanakan berbagai program kebijakan untuk menekan tingkat kemiskinan. Ada dua cara yang dilakukan pemerintah yaitu mengurangi beban biaya bagi rumah tangga sangat miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin. Meski sudah dilakukan usaha demikian, namun masih terjadi

masalah kemiskinan yang cukup tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi, dan bersinergi sehingga mampu mengurangi masalah kemiskinan. Namun masalah kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi mikro saja, tapi juga harus dilihat dari segi makro untuk menekan kemiskinan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2017

Gambar 1.2 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur, 2008–2017

Pembangunan ekonomi harus berfokus untuk mengurangi mekanisme yang membuat keluarga, daerah, dan bahkan negara secara keseluruhan terus berada dalam perangkap kemiskinan, yakni ketika kemiskinan masa lalu menyebabkan kemiskinan dimasa depan dan menghasilkan strategi paling efektif untuk melepaskan diri dari perangkap itu (Todaro dkk., 2010:10). Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk digolongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi disektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor

pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, pemerintah harus cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin di dapatkan dari sektor modern seperti jasa dan manufaktur yang padat modal.

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan ke seluruh sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Maka untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan (Wongdesmiwati, 2009). Pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan sebagai tolak ukur kinerja perekonomian suatu wilayah, akan tetapi tingginya pertumbuhan ekonomi belum tentu menunjukkan tingginya tingkat kesejahteraan rakyatnya. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika pemerataan pendapatan tidak terdistribusi dengan baik dengan kata lain pemerataan hanya dinikmati oleh segelintir kalangan saja.

Kemisikinan sendiri tidak bisa dipisahkan dari masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Dilihat dari karakteristik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, tidak dapat dipungkiri terjadi pola pembangunan ekonomi yang tidak seragam. Ketidak seragaman tersebut berpengaruh pada kemampuan pertumbuhan, selanjutnya mengakibatkan suatu wilayah mampu tumbuh dengan cepat sedangkan wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian mengakibatkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah (Putra,2011:2).

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah di kalangan penduduknya. Masalah Ketimpangan Distribusi Pendapatan dialami oleh semua provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan Distribusi Pendapatan tercermin dalam Gini Rasio. Bila Gini Rasio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Rasio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Seringkali masalah kemiskinan timbul seiring dengan masalah pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan suatu keadaan dimana

seseorang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum memperoleh pekerjaan (Sukarso,2010:13). Pengangguran dapat terjadi karena ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang diminta lebih sedikit dibandingkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Arsyad (2015:247) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dengan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, berada di antara kelompok masyarakat miskin.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang sangat kompleks dan merupakan proyek nasional yang harus ditangani oleh pemerintah daerah atupun pemerintah pusat. Oleh sebab itu penelitian ini bermaksud untuk menganalisis fenomena tersebut dengan mengambil judul penelitian “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Ditribusi Pendapatan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan suatu wilayah satu dengan wilayah yang lain memiliki faktor-faktor yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi tiap Kabupaten/Kota dalam mengatasi masalah kemiskinan. Berdasarkan pada latar belakang masalah maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Seberapa besar pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur ?
- b. Seberapa besar pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur ?
- c. Seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberi kontribusi kepada:

- a. Bagi Universitas Jember
Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai salah satu informasi dan tambahan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
- b. Bagi Peneliti
Hasil Penelitian diharapkan dapat menambah ilmu dan memperkaya pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
- c. Bagi instansi terkait
Hasil Penelitian diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur, sehingga dapat dicari strategi yang tepat dalam penanganan masalah ini.

BAB.2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Kemiskinan

Konsep mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 1995:17). Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan

Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1) Kemiskinan (*Proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2) Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

4) Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

5) Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan (Chambers, 1995).

2.1.2 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhankebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004:123):

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerahdaerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya

pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negaranegara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya (Jarnasy, 2004: 8-9). Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (developmentalism) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kedua jenis kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di negara-negara sedang berkembang pada dekade 1970an dan 1980an (Jarnasy, 2004: 8). Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini

masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Suryawati, 2004: 123).

Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

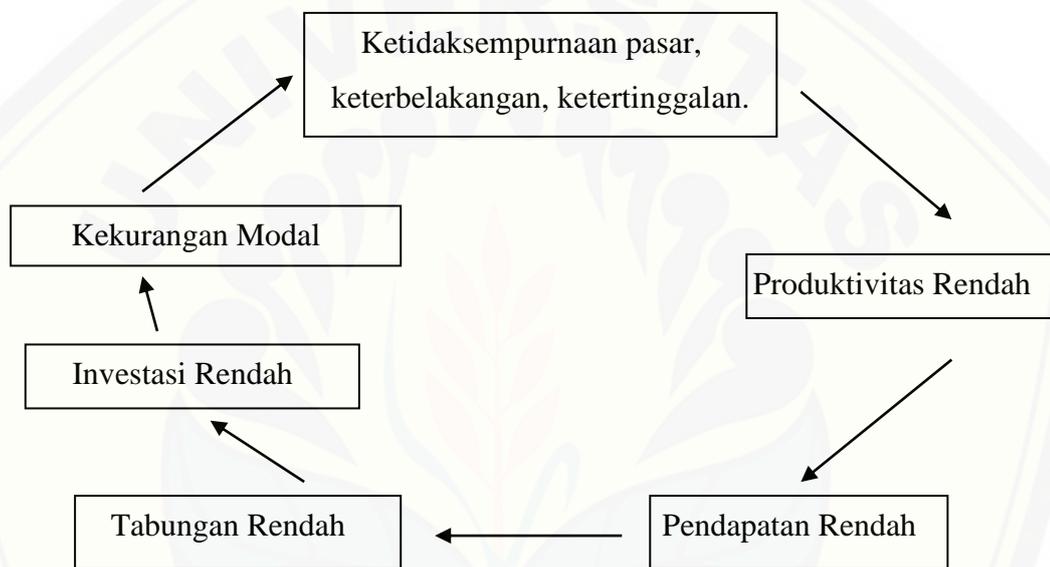
- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.
- 2) Tingkat pendidikan yang relatif rendah
- 3) Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
- 4) Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slum area)
- 5) Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

2.1.3 Teori Ragnar Nurkse (*Vicious Circle of Poverty*)

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (1997:134) sebagai berikut:

- 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
- 3) Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang digambarkan pada Gambar 2.1. Adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada kekurangan modal, kekurangan modal akan berakibat adanya keterbelakangan dan seterusnya.



Sumber: Nurkse (1953) dalam Mudrajad Kuncoro, 1997

Gambar 2.1 Teori Ragnar Nurkse (*Vicious Circle of Poverty*)

Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu negara menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin”(A country is poor because it is poor). Menurut pendapatnya, inti dari lingkaran kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan di lain pihak

oleh perangsang untuk menanam modal. Di negara berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat pembentukan modal yang tinggi.

2.1.4 Indikator Kemiskinan

Kemiskinan sendiri memiliki beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan yang dialami oleh seseorang atau kelompok. Indikator itu sendiri adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas (Eni Febriana, 2010). Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah :

1. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita, dan ibu.
2. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.
3. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalnya biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
4. Keterbatasan akses pada pekerjaan dan kurangnya pendapatan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, kecilnya upah pekerja, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.
5. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.
6. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan

penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani.

7. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam.
8. Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.
9. Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
10. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

2.1.5 Kriteria Kemiskinan

Ada berbagai macam kriteria yang digunakan untuk mengukur kemiskinan, salah satunya kriteria miskin menurut Sayogyo. Komponen yang digunakan sebagai dasar untuk ukuran garis kemiskinan Sajogyo adalah pendapatan keluarga yang disertakan dengan nilai harga beras yang berlaku pada saat itu dan rata anggota tiap rumah (lima orang) Berdasarkan kriteria tersebut, Sajogyo (1977) membedakan masyarakat ke dalam beberapa kelompok yaitu :

1. Sangat Miskin

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya dibawah setara 250 kg beras ekuivalen setiap orang dalam setahun penduduk yang tinggal diperkotaan.

2. Miskin

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berpendapatan setara dengan 240 kg beras sampai 320 kg beras selama setahun untuk penduduk yang tinggal didesa, dan 360 kg beras sampai 480 kg beras pertahun untuk tinggal diperkotaan.

3. Cukup

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang pendapatannya setara dengan lebih dari 480 kg beras setiap orang dalam setahun untuk penduduk

yang tinggal dipedesaan, dan di atas 720 kg beras setiap orang pertahun untuk yang tinggal diperkotaan.

Sedangkan kriteria penduduk miskin Badan Pusat Statistik (BPS), rumah tangga dikatakan miskin (BPS, 2008:17), apabila:

1. Luas lantai hunian kurang dari 8 m² per anggota rumah tangga.
2. Jenis lantai hunian sebagian besar tanah atau lainnya.
3. Fasilitas air bersih tidak ada.
4. Fasilitas jamban atau WC tidak ada.
5. Kepemilikan aset tidak tersedia.
6. Konsumsi lauk-pauk dalam seminggu tidak bervariasi.
7. Kemampuan membeli pakaian minimal 1 stel dalam setahun tidak ada.
8. Pendapatan (total pendapatan per bulan) kurang dari atau sama dengan Rp 350.000,-

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Schumpeter mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau teknologi produksi itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, sehingga proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi akan meningkat.

a. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya demi keuntungannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dan merupakan penganut kebijaksanaan “pasar

bebas” dalam ekonomi. Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang akan meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Tetapi Adam Smith menekankan bahwa penumpukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja karena sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Menurut Adam Smith apabila pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan, maka pemupukan modal berhenti, keuntungan menjadi minimum, upah berada pada tingkat kehidupan minimal, tidak ada perubahan pendapatan perkapita, serta produksi dan perekonomian menjadi macet. Sehingga keadaan ini mengakibatkan kesengsaraan makin parah atau kemiskinan meningkat (Jhingan,2003:81-83).

b. Teori Pertumbuhan Baru (Pertumbuhan Endogen)

Teori ini mengasumsikan bahwa investasi swasta dan publik (pemerintah) di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternal positif) dan memacu peningkatan produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan alamiah penurunan skala hasil. Dengan kata lain peranan pemerintah dibutuhkan dalam pembangunan manusia (*human capital*) untuk meningkatkan produktivitasnya. Dalam teori pertumbuhan baru ini terdapat persamaan sederhana yaitu :

$$Y = AK$$

Dalam rumusan ini A mewakili setiap faktor yang mempengaruhi teknologi, sedangkan K melambangkan modal fisik dan modal manusia yang ada. Dalam rumusan itu ditekankan adanya kemungkinan bahwa investasi modal fisik dan manusia akan dapat menciptakan ekonomi eksternal yang positif dan peningkatan produktivitas (Todaro dkk., 2010:183). Kenyataannya dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Kesejahteraan yang lebih

baik dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat (Anggit dan Fitrie, 2012).

c. Teori Arthur Lewis

Teori ini berfokus pada mekanisme yang membuat negara-negara miskin dan berkembang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mentransformasi struktur perekonomiannya dari yang semula sektor pertanian yang bersifat tradisional menjadi dominan ke sektor industri manufaktur yang lebih modern dan sektor jasa-jasa.

Menurut Lewis, dalam perekonomian yang terbelakang ada 2 sektor yaitu sektor pertanian dan sektor industri manufaktur. Sektor pertanian adalah sektor tradisional dengan marginal produktivitas tenaga kerja nol. Dengan kata lain, apabila tenaga kerjanya dikurangi tidak akan mengurangi output dari sektor pertanian. Sektor industri modern adalah sektor modern dan outputnya dari sektor akan bertambah bila tenaga kerja dari sektor pertanian berpindah ke sektor modern ini. Masuknya tenaga kerja ke sektor modern akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan output (Tamtomo, 2010).

d. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet memiliki korelasi yang kuat terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati tahap akhir terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan (Saharuddin, 2016).

Mankiw (2000:158) menyatakan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Sukirno (2002:25) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya (*sufficient condition*) ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi

kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar disetiap golongan pendapatan termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*).

Menurut M. Kuncoro suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang dicapai sebelumnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka sebuah Negara dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa semakin meningkatnya produksi suatu Negara tersebut. Sehingga masyarakat bias memenuhi kebutuhan sehari-sehari dengan cepat. Sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dapat mengurangi kemiskinan di suatu negara (Dwi, 2010:32).

2.1.7 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

a. Definisi Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis, dapat menggunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien Gini (Gini Ratio) dan Ukuran Bank Dunia. Para ahli ekonomi pada umumnya membedakan antara dua ukuran utama dari distribusi pendapatan baik untuk tujuan analisis maupun kuantitatif, yaitu:

1) Distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution of income*).

Distribusi pendapatan perorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu atau perorangan termasuk pula rumah tangga. Dalam konsep ini, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang tidak dipersoalkan cara yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga yang mencari penghasilan tersebut berasal dari bekerja atau sumber lainnya seperti bunga, hadiah, keuntungan maupun warisan. Demikian pula tempat dan sektor sumber pendapatanpun turut diabaikan.

2) Distribusi pendapatan fungsional

Distribusi pendapatan fungsional mencoba menerangkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh tiap faktor produksi. Faktor produksi tersebut terdiri dari tanah atau sumberdaya alam, tenaga kerja, dan modal. Pendapatan didistribusikan sesuai dengan fungsinya seperti buruh menerima upah, pemilik tanah menerima sewa dan pemilik modal menerima bunga serta laba. Jadi setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan kontribusinya pada produksi nasional, tidak lebih dan tidak kurang. Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan, adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam:

1. Pendapatan karena hasil kerja yang berupa upah atau gaji dan besarnya tergantung tingkat produktifitas.
2. Pendapatan dari sumber lain seperti sewa, laba, bunga, hadiah atau warisan (Todaro dkk., 2011: 210-211).

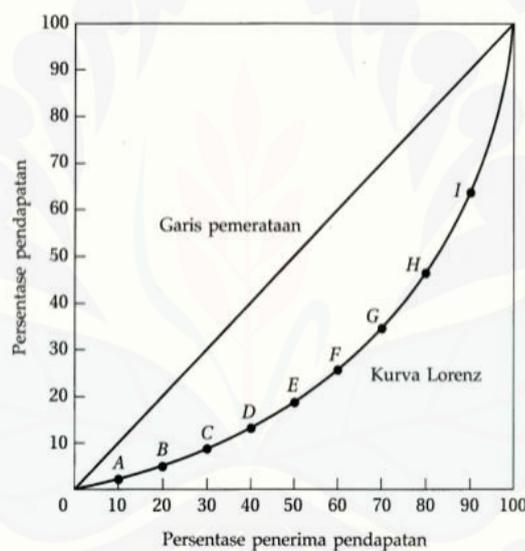
Menurut Irma Adelma dan Chynthia Taft Morris dalam Arsyad (1997:273) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita,
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang,
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah,
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah,
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan kebijakan industry substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industry untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis,

7. Memburuknya nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan Negara-Negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan Negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB,
8. Hancurnya industry kerajinan rakyat seperti pertukangan, industry rumah tangga, dan lain-lain.

b. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk.



Sumber : Lincoln Arsyad,1997

Gambar 2.2 Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*)

Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata (Lincoln Arsyad,1997:232).

c. Indeks atau Rasio Gini

Corrado Gini mengenalkan konsep Gini Ratio yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

Keterangan :

G : Gini Ratio

P_i : Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q₁ : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Q_{i-1} : Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas

K : Banyaknya kelas pendapatan

Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna), hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya Koefisien Gini untuk negara - negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, ketimpangan sedang berkisar antara 0,36 hingga 0,49 sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35 (Todaro,2006:208-209).

1. GR < 0,3 : Ketimpangan Rendah

2. 0,3 ≤ GR ≤ 0,5 : Ketimpangan Sedang

3. GR > 0,5 : Ketimpangan Tinggi

d. Hubungan Antara Distribusi Pendapatan Dengan Kemiskinan

Kemisikinan sendiri tidak bisa dipisahkan dari masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Dilihat dari karakteristik Indonesia yang terdiri dari ribuan

pulau, tidak dapat dipungkiri terjadi pola pembangunan ekonomi yang tidak seragam. Ketidak seragaman tersebut berpengaruh pada kemampuan pertumbuhan, selanjutnya mengakibatkan suatu wilayah mampu tumbuh dengan cepat sedangkan wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian mengakibatkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun pendapatan antar daerah (Putra,2011:2).

Menurut Todaro (2003:92), Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.

2.1.8 Tingkat Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran biasanya dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, yaitu pengangguran friksional, struktural dan konjungtur, sedangkan jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya adalah sebagai berikut (Sukirno 2000:330) :

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terjadi sebagai akibat pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

b. Pengangguran tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

c. Pengangguran Musiman

Pengangguran yang terjadi di masa-masa tertentu dalam satu tahun. Fenomena ini bisa terjadi pada sektor pertanian dimana petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

d. Setengah Menganggur

Setengah Menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan, atau pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika rumah tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka pengangguran akan secara langsung mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan (*income poverty rate*) maupun kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi (*consumption poverty rate*).

a. Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes merupakan hal yang berlawanan dengan teori klasik. Keynes beranggapan bahwa pada dasarnya tingkat pengangguran adalah suatu kejadian yang tidak terlepas dari perekonomian suatu negara/wilayah (pendapatan nasional/pertumbuhan ekonomi), tingkat inflasi, dan lain sebagainya. Keynes berpendapat ketika tingkat upah turun maka pendapatan akan turun, dan dampaknya adalah daya beli masyarakat akan berkurang, maka akan terjadi kelebihan kapasitas produksi dan akan merugikan perusahaan, sehingga perusahaan akan memberhentikan tenaga kerjanya, selanjutnya perusahaan akan mengurangi tenaga kerjanya, sehingga penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) tidak akan tercapai.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat

menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro,dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

b. Hubungan Antara Tingkat Pengangguran Dengan Kemiskinan

Hubungan tingkat pengangguran dan kemiskinan sangat erat sekali, jika suatu masyarakat sudah bekerja pasti masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhannya, namun di dalam masyarakat masih ada yang belum bekerja atau menganggur, pengangguran secara otomatis akan mengurangi kesejahteraan suatu masyarakat yang secara otomatis juga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas.

Menurut Sukirno (2002: 50), salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat diwujudkan. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat, hal ini yang dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kemakmuran masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang masyarakat terjebak dalam kemiskinann karena tidak memiliki pendapatan. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Apabila pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial

selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yaitu yang dilakukan oleh Diah & Harsuti. Pada Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah”. Metode ini dilakukan dengan metode data panel dan jenis data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, Pertumbuhan ekonomi regional memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Anggit Dan Fitri(2012). Pada Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui besarnya pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009”. Metode ini dilakukan dengan metode data panel dan jenis data sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Variabel PDRB, Pendidikan, dan Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008). Pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak pertumbuhan ekonomu terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Penelitian ini berjudul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”. Metode ini dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun relatif kecil.

Penelitian keempat dilakukan oleh Saharuddin dan Ferri(2016). Pada Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari jumlah penduduk, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten Lebak

dalam periode 2003 sampai 2012. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak”. Metode ini dilakukan dengan metode OLS. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Variabel populasi, variabel pendidikan dan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Vighar Choirul Iqbal (2015). Pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh performa ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Performa Ekonomi Makro terhadap Kemiskinan di Jawa Timur”. Metode ini dilakukan dengan menggunakan data panel. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel laju pertumbuhan ekonomi ataupun tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Jawa Timur..

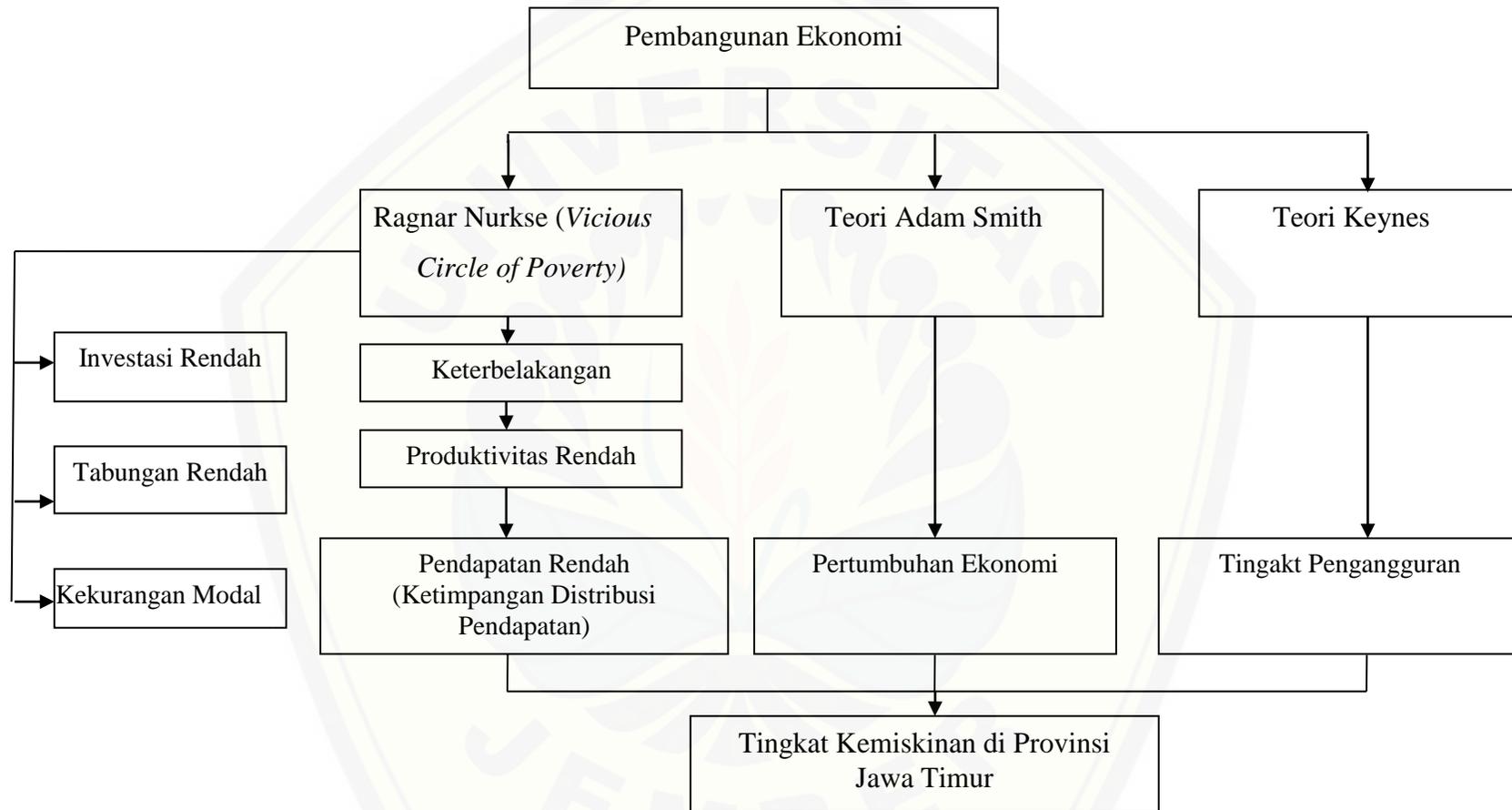
Penelitian keenam dilakukan oleh Akhmad, Ilyas, Amir(2018). Pada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini berjudul “*The effect Of Economic Growth And Income Inequality On Poverty In Indonesia*”. Metode ini dilakukan dengan Analisis regresi deskriptif dan berganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Ada efek positif dan signifikan dari variabel indeks Gini terhadap peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan Regional Bruto Produk Domestik (PDRB) memiliki dampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Pembahasan
1	“Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah” Diah & Harsuti	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah	Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan	Metode data panel	Pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, Pertumbuhan ekonomi regional memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.
2	”Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009” Anggit Dan Fitri(2012)	Mengetahui besarnya pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah	PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan	Metode data panel	Variabel PDRB, Pendidikan, dan Kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah
3	“Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin” Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008)	Mengetahui dan menganalisis dampak pertumbuhan ekonomu terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia	Kemiskinan, PDRB, Agrishare, Indutrishare, Popilasi, Inflasi, Pendidikan, Dummy Krisis	Analisis Deskriptif	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin walaupun relatif kecil.
4	“Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan	Untuk menganalisis pengaruh dari jumlah penduduk, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap	Jumlah Penduduk, Pendidika, Pertumbuhan	OLS	Variabel populasi, variabel pendidikan dan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki

	Ekonomi Terhadap Kemiskinan Kabupaten Lebak Saharuddin dan Ferri(2016)	Terhadap Di Kabupaten Lebak” dan	kemiskinan di kabupaten Lebak dalam periode 2003 sampai 2012.	Ekonomi, Kemiskinan			pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak .
5	“Analisis Performa Makro Kemiskinan di Jawa Timur” Vighar Choirul Iqbal(2015)	Pengaruh Ekonomi terhadap di Jawa Timur	Untuk mengetahui pengaruh ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Timur	Pertumbuhan ekonomi, Pengangguran, IPM, Kemiskinan	Regresi data Panel		Variabel laju pertumbuhan ekonomi ataupun tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Sedangkan variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.
6	“ <i>The effect Of Economic Growth And Income Inequality On Poverty In Indonesia</i> ” Akhmad, Ilyas, Amir(2018)		Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia	Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, kemiskinan	Analisis regresi deskriptif dan berganda		Ada efek positif dan signifikan dari variabel indeks Gini terhadap peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan Regional Bruto Produk Domestik (PDRB) memiliki dampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

2.3 Kerangka Konseptual

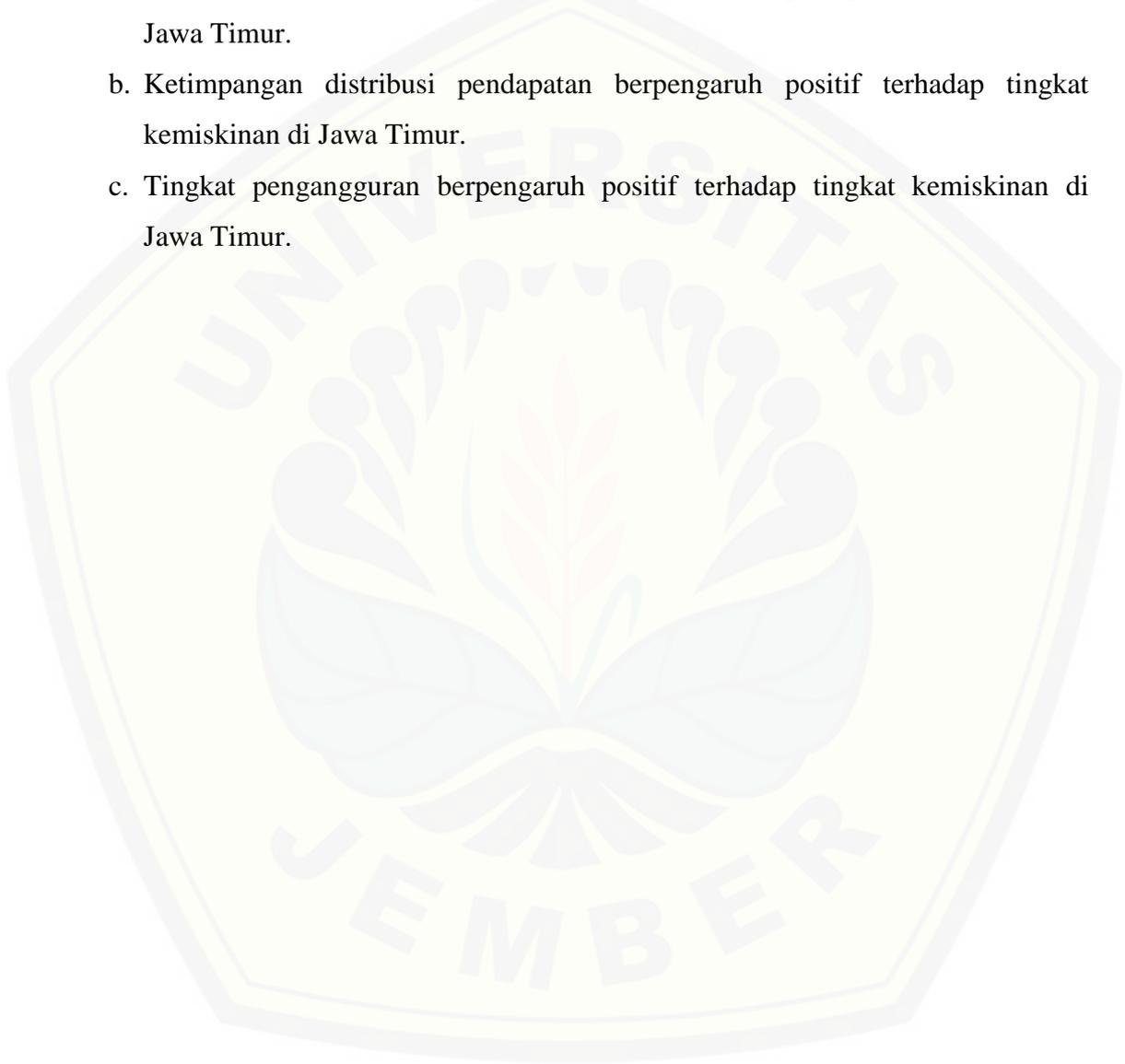


Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan yang didasarkan dari teori dan penelitian terdahulu. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
- b. Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
- c. Tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian *explanatory research* dengan pendekatannya yaitu kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:21), metode *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain melalui pengujian hipotesa.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin di Jawa Timur dengan menggunakan variabel *dependent* tingkat kemiskinan, sedangkan variabel *independent* yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan tingkat pengangguran.

3.1.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS Jawa Timur), dan sumber lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pertumbuhan Ekonomi (persen), Gini Ratio (persen), Tingkat Pengangguran Terbuka (persen). Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu data yang disusun secara kronologis menurut waktu pada suatu variabel tertentu (Kuncoro,2001:146). Data runtun waktu (*time series*) yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2008-2017. Sedangkan data *cross section* adalah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Model Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Statistik, dan Uji Asumsi Klasik.

3.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Studi ini menggunakan analisis panel data (*pooled data*) sebagai alat

pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 9. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*). (Mahulete, 2016). Adapun fungsi model ekonomi dari variabel penelitian, sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2, X_3)$$

Model persamaan variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_{oi} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Fungsi diatas menjelaskan pengertian bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, dan tingkat pengangguran, sedangkan alpha nol merupakan konstanta. Diasumsikan bahwa variabel lain diluar variabel tidak berubah.

Dimana :

Y : Tingkat Kemiskinan

X1 : Pertumbuhan Ekonomi

X2 : Ketimpangan Distribusi Pendapatan

X3 : Tingkat Pengangguran

α : Konstanta

β_1 : Parameter X1

β_2 : Parameter X2

β_3 : Parameter X3

i : Kabupaten/Kota

t : Waktu

ε_{it} : Variabel Pengganggu

Menurut Hsiao dan Baltagi (2003), keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah :

- a. Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap individu.
- b. Dengan data panel, data lebih informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*), dan lebih efisien.
- c. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis

dibandingkan dengan studi berulang dari *cross-section*.

- d. Data panel lebih mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diukur oleh data times series atau *cross-section*, misalnya efek dari upah minimum.
- e. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks, misalnya fenomena skala ekonomi dan perubahan teknologi.
- f. Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregasi individu atau perusahaan karena unit data lebih banyak.

Terdapat beberapa metode mendasar yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Sebelum dilakukan pengestimasi model penelitian, dilakukan uji spesifikasi untuk menganalisis apakah menggunakan *Common Effect*, *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan Uji *Chow* dan Uji *Hausman* (Widarjono, 2009: 231-240).

3.2.2 *Common Effect Model*

Model *Common Effect* menggabungkan dan *Cross Section* dengan *Time Series* dan menggunakan OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut (Widarjono, 2009). Model ini merupakan model paling sederhana dibandingkan dengan kedua model lainnya. Model ini tidak dapat membedakan varians antara silang tempat dan titik waktu karena memiliki *intercept* yang tetap, dan bukan bervariasi secara random (Kuncoro, 2012).

3.2.3 *Fixed Effect Model*

Metode FEM digunakan untuk mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk mengetahui adanya perubahan-perubahan dalam intersep. Asumsi yang digunakan dalam metode ini adalah :

- a. Intersep dan koefisien slope adalah tetap antara waktu dan ruang, error term mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu.
- b. Slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu.
- c. Slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu.

- d. Intersep dan Slope berbeda antar individu dan
- e. Intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.

Teknik ini dinamakan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat mengkombinasikan efek waktu yang bersifat sistematis. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan variabel dummy waktu di dalam model (Silalahi,2012:266).

3.2.4 *Random Effect Model*

Metode ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada metode ini, perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing. Keuntungan metode ini akan menghilangkan heterokedastisitas. Metode ini disebut juga dengan *error Component Model* (ECM) atau *Generalized Least Square* (GLS) (Mahulete, 2016).

3.3 Uji Spesifikasi Model

3.3.1 Uji Chow

Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji Statistik F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode *Common Effect* (Mahulete,2016).

Hipotesis nol pada uji ini adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect*.

Nilai Statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (*degre of freedom*) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak $n - k$ untuk denumerator. m merupakan merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa variabel dummy. Jumlah restriksi adalah jumlah individu dikurang satu. n merupakan jumlah observasi dan k merupakan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect*. Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu dikali

dengan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect* (k) adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect*.

3.3.2 Uji Hausman

Hausman telah dilakukan untuk memilih apakah metode *Fixed Effect* dan metode *Random Effect* lebih baik dari metode *Common Effect*. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dalam metode metode *Fixed Effect* dan *Generalized Least Squares* (GLS) dalam metode *Random Effect* adalah efisien sedangkan *Ordinary Least Squares* (OLS) dalam metode *Common Effect* tidak efisien. Dilain pihak, alternatifnya adalah metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut (Mahulete, 2016).

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect* (Ekananda, 2015:405).

3.4 Uji Statistik

3.4.1 Uji F (secara simultan)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji simultan (uji F). Pengujian ini bertujuan

untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012:98).

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, menggunakan uji F dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, berarti hubungan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
2. $H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, berarti hubungan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Gini Rasio, Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pada taraf signifikansi 5% kriteria pengujian yang digunakan adalah apabila nilai F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_1 . Artinya ada pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dan sebaliknya bila, F hitung $<$ Ftabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

dimana :

R^2 : koefisien determinasi

k : jumlah variabel independen termasuk konstanta

n : jumlah sampel

3.4.2 Uji t (secara parsial)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2012:98). Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik t, dimana nilai t hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$t \text{ hitung} = \frac{b_j}{se(b_j)}$$

dimana :

b_j = koefisien regresi

$se(b_j)$ = standar error koefisien regresi

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung $>$ t tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung $<$ t tabel maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2012:97) koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

3.5 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik, jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas serta data yang dihasilkan harus berdistribusi normal. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut :

3.5.1 Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada fungsi

linear yang sempurna pada beberapa atau semua variabel independen dalam fungsi linear dan hasilnya sulit didapatkan pengaruh antara independen dan dependen variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas atau korelasi tinggi antarvariabel independen dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2003).

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data cross section (Imam Ghazali, 2012:139).

Hipotesis :

H₀ : Tidak ada masalah heteroskedastisitas

H₁ : Ada masalah heteroskedastisitas

Probabilitas < Alpha (0,05), H₀ ditolak, H₁ diterima

Probabilitas > Alpha (0,05), H₁ ditolak, H₀ diterima

3.5.3 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak berlaku (Imam Ghazali, 2012:160). Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan Jarque-Berra test. Untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak dengan cara membandingkan Jarque-Berra X^2 , apabila nilai J-B < X^2 tabel maka residualnya berdistribusi normal. Selanjutnya, dengan cara membandingkan probabilitas JB nya yaitu apabila nilai

probabilitas $JB > \alpha$ (5%) maka residualnya berdistribusi normal (Gujarati, 2012:240).

3.6 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

Untuk mencegah pemahaman yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan pembahasan maka definisi variabel operasional dan pengukurannya adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan (Y) perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk total Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2008-2017 yang dinyatakan dalam satuan persen pertahun. Tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di masing masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Garis kemiskinan yang merupakan dasar perhitungan jumlah penduduk miskin ditentukan dari pendapatan (total pendapatan per bulan) kurang dari atau sama dengan Rp 350.000,-
2. Pertumbuhan Ekonomi (X1) adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini nilai variabel yang digunakan diambil dari laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2017 yang dinyatakan dalam satuan persen pertahun.
3. Ketimpangan Distribusi Pendapatan (X2), Distribusi pendapatan mencerminkan keseimbangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Ketimpangan distribusi pendapatan dilihat dari Gini Rasio Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2008-2017 yang dinyatakan dalam satuan persen pertahun.
4. Tingkat Pengangguran (X3) adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Dalam penelitian ini, data yang

digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka, dihitung dari rasio antara jumlah yang menganggur atau mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2008-2017 yang dinyatakan dalam satuan persen pertahun.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
2. Variabel Ketimpangan Distribusi Pendapatan berpengaruh tidak signifikan secara positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti apabila ketimpangan distribusi mengalami kenaikan maka tidak akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
3. Variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti apabila tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terdapat saran yang direkomendasikan antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan dan pelatihan skill dari tenaga kerja harus ditingkatkan kembali. Era digital dan era industri 4.0 mewajibkan tenaga kerja memiliki skill untuk menguasai teknologi.
2. Mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan meskipun tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan sehingga perlu adanya kebijakan penyediaan lapangan kerja yang besar serta mendorong pengembangan sektor padat karya sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi Ketiga*. EKONISIA. Yogyakarta.
- Anggit Dan Fitri. 2012. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *Jurnal*. Universitas Diponegoro
- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN:Yogyakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2015. *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kelima*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2008, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008* . Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2017, *Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2017* . Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2017, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2017*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto. 2016. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Rajawali Pers:Jakarta.
- Chambers, Robert. 1995. *Poverty and Livelihood:Whose Reality Counts, Discussion Paper 347*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Ekananda, Mahyus. (2015). *Ekonometrika Dasar. Edisi pertama*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Dwi Ravi. 2010. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jateng Tahun 2009-2008. *Skripsi*. Semarang: UNDIP
- Febriana, Eni. 2010. Strategi Untuk Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Miskin di Perdesaan. *Tesis*. Universitas Indonesia
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.

- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008, “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”. *Jurnal*. Institut Pertanian Bogor
- Hsiao & Baltagi. 2003. *Analysis of Panel Data*. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jarnasy, Owin. 2004. *Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika.
- Jhingan, M.L. 2003 . *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian*. Jakarta : PT. Raya Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Kuncoro. Mudrajad. 2001. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Asumsi Klasik*. Cetakan Pertama. Bandung: ALFABETA.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013 . *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta; UPP STIM YPKN Yogyakarta.
- Mahulete, Ummi K. 2016. Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. *Teori Makroekonomi Edisi Keempat*. Terjemahan : Imam Nurmawan. Jakarta : Erlangga.
- M. Muh. Nasir, Saichudin dan Maulizar. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi. Jakarta.
- Nugroho, Heru. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo. 2003 . Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan. *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*.
- Putra, Nusa. 2011. *Research and development Penelitian dan pengembangan suatu pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Saharuddin dan Ferri. 2016. Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*. 6(1), April.

- Sajogyo. 1977. Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa Yogyakarta. *Prisma*. 6 (3), Maret. LP3ES. Jakarta.
- Schumpeter, Joseph Alois. 1991. *Theory of Economic Development* Jerman.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Reflika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sadono Sukirno, 2000. *Makro Ekonomi Modern*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Makroekonomi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Edisi kedua
- Sukarso dan Iskandar Putong. 2015. *Kepemimpinan : Kajian Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Airlangga
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.
- Suryawati Chriswardani. 2005 . Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan*. Volume 08. No. 03. Edisi September (121-129).
- Tambunan, Tulus T H. (2003). *Perekonomian Indonesia: Beberapa Permasalahan Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tamtomo Edi. 2010. Analisis pertumbuhan Daerah di Era Desentralisasi. *Tesis*. FE UI.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2003 .*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2006 .*Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9: Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2010. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2011. *Economic Development*. New York: Mac Graw Hill Education.
- Wongdesmiwati. 2009. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2004: Analisis Ekonometrika. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*

LAMPIRAN A1**Data Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2017**

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pacitan	21,17	19,01	19,50	18,10	17,23	16,66	16,18	16,68	15,49	15,42
2	Ponorogo	16,62	14,63	13,22	12,30	11,72	11,87	11,53	11,91	11,75	11,39
3	Trenggalek	20,64	18,27	15,98	14,90	14,16	13,50	13,10	13,39	13,24	12,96
4	Tulungagung	12,41	10,60	10,64	9,90	9,37	9,03	8,75	8,57	8,23	8,04
5	Blitar	14,53	13,19	12,14	11,30	10,71	10,53	10,22	9,97	9,88	9,80
6	Kediri	18,85	17,05	15,52	14,40	13,67	13,17	12,77	12,91	12,72	12,25
7	Malang	15,08	13,57	12,54	11,70	11,01	11,44	11,07	11,53	11,49	11,04
8	Lumajang	18,17	15,83	13,98	13,00	12,36	12,09	11,75	11,52	11,22	10,87
9	Jember	17,74	15,43	13,27	12,40	11,77	11,63	11,28	11,22	10,97	11,00
10	Banyuwangi	13,91	12,16	11,25	10,50	9,94	9,57	9,29	9,17	8,79	8,64
11	Bondowoso	22,23	20,18	17,89	16,70	15,76	15,23	14,76	14,96	15,00	14,54
12	Situbondo	18,02	15,99	16,23	15,10	14,30	13,59	13,15	13,63	13,34	13,05
13	Probolinggo	30,13	27,69	25,22	23,50	22,15	21,12	20,44	20,82	20,98	20,52
14	Pasuruan	18,04	15,58	13,18	12,30	11,54	11,22	10,86	10,72	10,57	10,34
15	Sidoarjo	8,35	6,91	7,45	7,00	6,42	6,69	6,40	6,44	6,39	6,23
16	Mojokerto	14,61	13,24	12,23	11,40	10,67	10,94	10,56	10,57	10,61	10,19
17	Jombang	16,46	14,46	13,84	12,90	12,19	11,12	10,80	10,79	10,70	10,48
18	Nganjuk	19,77	17,22	14,91	13,90	13,17	13,55	13,14	12,69	12,25	11,98
19	Madiun	18,50	16,97	15,45	14,40	13,66	12,40	12,04	12,54	12,69	12,28
20	Magetan	15,67	13,97	12,95	12,00	11,46	12,14	11,80	11,35	11,03	10,48
21	Ngawi	20,86	19,01	18,26	16,70	15,94	15,38	14,88	15,61	15,27	14,91
22	Bojonegoro	23,87	21,27	18,78	17,50	16,60	15,95	15,48	15,71	14,60	14,34
23	Tuban	25,84	23,01	20,19	18,80	17,78	17,16	16,64	17,08	17,14	16,87
24	Lamongan	22,51	20,47	18,70	17,40	16,64	16,12	15,68	15,38	14,89	14,42
25	Gresik	21,43	19,14	16,42	15,30	14,30	13,89	13,41	13,63	13,19	12,80
26	Bangkalan	32,70	30,45	28,2	26,20	24,62	23,14	22,38	22,57	21,41	21,32
27	Sampang	34,53	31,94	32,4	30,20	27,88	26,97	25,80	25,69	24,11	23,56
28	Pamekasan	26,32	24,32	22,8	20,90	19,54	18,45	17,74	17,41	16,70	16,00
29	Sumenep	29,46	26,89	24,61	23,10	21,88	21,13	20,49	20,20	20,09	19,62
30	Kota Kediri	11,71	10,41	9,31	8,60	8,11	8,20	7,95	8,51	8,40	8,49
31	Kota Blitar	9,34	7,56	7,63	7,10	6,73	7,39	7,15	7,29	7,18	8,03
32	Kota Malang	7,22	5,58	5,90	5,50	5,19	4,85	4,80	4,60	4,33	4,17
33	Kota Probolinggo	23,29	21,06	19,03	17,70	18,33	17,35	8,37	8,17	7,97	7,84
34	Kota Pasuruan	11,20	9,34	9,00	8,40	7,88	7,57	7,34	7,47	7,62	7,53
35	Kota Mojokerto	8,88	7,19	7,42	6,90	6,46	6,63	6,42	6,16	5,73	5,73
36	Kota Madiun	6,69	5,93	6,11	5,70	5,35	5,00	4,86	4,89	5,16	4,94
37	Kota Surabaya	8,23	6,72	7,07	6,60	6,23	5,97	5,79	5,82	5,63	5,39
38	Kota Batu	6,18	4,81	5,11	4,70	4,45	4,75	4,59	4,71	4,48	4,31
	Jawa Timur	18,19	16,22	14,87	13,80	13,0	12,73	12,28	12,34	12,05	11,77

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2017 (data diolah)

LAMPIRAN A2**Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2017**

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pacitan	5,57	6,07	6,53	6,29	6,33	5,88	5,2	5,1	5,63	4,98
2	Ponorogo	5,68	5,16	5,76	5,7	5,98	5,14	5,21	5,24	5,39	5,1
3	Trenggalek	5,61	5,64	6,11	5,94	6,21	6,01	5,28	5,03	5,63	5,02
4	Tulungagung	5,86	6,01	6,48	6,37	6,47	6,13	5,46	4,99	5,76	5,08
5	Blitar	6,04	5,18	6,09	5,43	5,62	5,06	5,02	5,05	5,19	5,07
6	Kediri	4,36	4,74	6,04	6,32	6,11	5,82	5,32	4,88	5,53	4,9
7	Malang	5,75	5,16	6,27	6,65	6,77	5,3	6,01	5,26	5,84	5,43
8	Lumajang	5,43	5,46	5,92	6,2	6	5,59	5,32	4,88	5,53	5,05
9	Jember	6,04	5,55	6,05	5,49	5,83	6,06	6,2	5,33	5,83	5,11
10	Banyuwangi	5,76	6,04	6,22	6,95	7,25	6,71	5,7	6,01	6,42	5,45
11	Bondowoso	5,31	5,01	6,64	6,07	6,09	5,81	5,05	4,95	5,47	5,03
12	Situbondo	5,24	5,02	5,75	5,38	5,43	6,18	5,78	4,86	5,57	5,07
13	Probolinggo	5,78	5,72	6,19	5,88	6,44	5,15	4,9	4,76	5,31	4,46
14	Pasuruan	5,89	5,31	6,14	6,69	7,5	6,95	6,74	5,38	6,64	5,72
15	Sidoarjo	4,67	4,9	5,65	7,04	7,26	6,89	6,44	5,24	6,46	5,8
16	Mojokerto	5,88	5,18	6,78	6,61	7,25	6,56	6,45	5,65	6,48	5,74
17	Jombang	5,98	5,27	6,12	5,96	6,15	5,93	5,42	5,35	5,71	5,36
18	Nganjuk	5,98	6	6,28	5,75	5,85	5,4	5,11	5,18	5,38	5,26
19	Madiun	5,27	5,08	5,92	6,02	6,12	5,67	5,34	5,26	5,60	5,42
20	Magetan	5,17	5,36	5,79	5,64	5,79	5,86	5,1	5,17	5,48	5,09
21	Ngawi	5,52	5,65	6,09	6,11	6,63	5,5	5,82	5,08	5,76	5,07
22	Bojonegoro	12,43	6,46	11,84	10,39	3,77	2,37	2,29	17,43	6,46	10,26
23	Tuban	6,72	6,56	6,22	6,84	6,29	5,86	5,47	4,89	5,62	5
24	Lamongan	6,22	6,31	6,89	6,67	6,93	6,93	6,3	5,77	6,48	5,52
25	Gresik	6,34	6,28	7,06	6,48	6,92	6,04	7,04	6,58	6,65	5,83
26	Bangkalan	4,92	4,96	5,44	3,31	1,42	0,19	7,2	2,67	0,82	3,53
27	Sampang	4,58	4,64	5,34	2,5	5,78	6,53	0,08	2,07	3,62	4,69
28	Pamekasan	5,53	5,18	5,75	6,22	6,26	6,09	5,62	5,32	5,83	5,04
29	Sumenep	4,75	4,85	5,64	6,13	9,96	14,45	6,23	1,27	7,98	2,86
30	Kota Kediri	4,66	5,06	5,91	4,29	5,27	3,52	5,85	5,36	5,00	5,14
31	Kota Blitar	6,29	6,21	6,32	6,43	6,55	6,49	5,89	5,67	6,15	5,78
32	Kota Malang	6,18	4,9	6,25	6,04	6,26	6,2	5,8	5,61	5,97	5,69
33	Kota Probolinggo	6,02	5,35	6,12	5,95	6,48	6,47	5,94	5,86	6,19	5,88
34	Kota Pasuruan	5,47	5,03	5,66	6,28	6,3	6,52	5,7	5,53	6,01	5,47
35	Kota Mojokerto	5,27	5,14	6,09	5,97	6,06	6,22	5,83	5,72	5,96	5,65
36	Kota Madiun	6,24	6,06	6,93	6,79	6,84	7,68	6,63	6,14	6,82	5,93
37	Kota Surabaya	6,23	5,53	7,09	7,13	7,35	7,58	6,96	5,97	6,97	6,13
38	Kota Batu	6,88	6,74	7,52	7,13	7,26	7,29	6,9	6,7	7,07	6,56
	Jawa Timur	5,94	5,01	6,33	6,44	6,21	6,05	5,59	5,31	5,79	5,45

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

LAMPIRAN 3A**Data Gini Rasio Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2017**

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pacitan	0,34	0,27	0,29	0,34	0,31	0,33	0,31	0,33	0,36	0,32
2	Ponorogo	0,22	0,25	0,25	0,29	0,31	0,34	0,31	0,36	0,36	0,34
3	Trenggalek	0,2	0,28	0,29	0,34	0,32	0,35	0,31	0,37	0,39	0,35
4	Tulungagung	0,29	0,28	0,27	0,32	0,34	0,37	0,31	0,36	0,37	0,35
5	Blitar	0,28	0,3	0,27	0,33	0,36	0,33	0,3	0,33	0,34	0,37
6	Kediri	0,26	0,25	0,26	0,31	0,32	0,3	0,31	0,34	0,38	0,34
7	Malang	0,28	0,29	0,3	0,33	0,32	0,38	0,33	0,38	0,32	0,35
8	Lumajang	0,26	0,23	0,24	0,27	0,27	0,23	0,23	0,29	0,35	0,31
9	Jember	0,24	0,3	0,25	0,31	0,28	0,26	0,26	0,33	0,31	0,34
10	Banyuwangi	0,28	0,26	0,24	0,32	0,29	0,3	0,29	0,34	0,33	0,34
11	Bondowoso	0,22	0,25	0,21	0,29	0,3	0,28	0,27	0,32	0,35	0,32
12	Situbondo	0,29	0,29	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29	0,33	0,35	0,33
13	Probolinggo	0,28	0,3	0,25	0,28	0,3	0,34	0,32	0,3	0,31	0,36
14	Pasuruan	0,3	0,27	0,26	0,28	0,3	0,28	0,28	0,32	0,32	0,34
15	Sidoarjo	0,25	0,32	0,27	0,31	0,33	0,3	0,3	0,35	0,37	0,34
16	Mojokerto	0,26	0,25	0,25	0,27	0,28	0,28	0,27	0,31	0,3	0,32
17	Jombang	0,28	0,27	0,26	0,37	0,3	0,28	0,32	0,32	0,34	0,34
18	Nganjuk	0,27	0,25	0,24	0,31	0,38	0,33	0,3	0,35	0,36	0,33
19	Madiun	0,28	0,27	0,25	0,29	0,34	0,3	0,28	0,32	0,34	0,32
20	Magetan	0,26	0,28	0,27	0,31	0,33	0,34	0,32	0,34	0,37	0,39
21	Ngawi	0,26	0,27	0,22	0,3	0,3	0,32	0,34	0,34	0,34	0,34
22	Bojonegoro	0,24	0,26	0,28	0,27	0,31	0,32	0,28	0,32	0,32	0,29
23	Tuban	0,27	0,23	0,25	0,28	0,27	0,3	0,24	0,29	0,33	0,31
24	Lamongan	0,25	0,22	0,23	0,29	0,27	0,31	0,27	0,3	0,3	0,32
25	Gresik	0,34	0,26	0,24	0,33	0,43	0,36	0,28	0,31	0,33	0,29
26	Bangkalan	0,34	0,29	0,29	0,3	0,28	0,28	0,33	0,32	0,31	0,30
27	Sampang	0,25	0,27	0,24	26	0,25	0,25	0,23	0,3	0,31	0,29
28	Pamekasan	0,25	0,24	0,26	0,28	0,24	0,25	0,26	0,34	0,36	0,33
29	Sumenep	0,24	0,24	0,27	0,27	0,3	0,29	0,25	0,26	0,31	0,24
30	Kota Kediri	0,29	0,3	0,28	0,39	0,39	0,33	0,31	0,40	0,39	0,40
31	Kota Blitar	0,32	0,32	0,33	0,34	0,38	0,4	0,35	0,37	0,41	0,39
32	Kota Malang	0,35	0,34	0,35	0,36	0,48	0,38	0,37	0,38	0,41	0,42
33	KotaProbolinggo	0,36	0,24	0,24	0,33	0,28	0,38	0,33	0,36	0,31	0,37
34	Kota Pasuruan	0,29	0,28	0,27	0,37	0,37	0,32	0,31	0,39	0,4	0,38
35	Kota Mojokerto	0,28	0,33	0,31	0,36	0,3	0,3	0,31	0,36	0,37	0,39
36	Kota Madiun	0,25	0,3	0,32	0,33	0,35	0,43	0,34	0,38	0,42	0,36
37	Kota Surabaya	0,32	0,36	0,36	0,37	0,4	0,37	0,39	0,42	0,39	0,39
38	Kota Batu	0,27	0,25	0,31	0,32	0,32	0,31	0,29	0,36	0,34	0,30
	Jawa Timur	0,35	0,32	0,31	0,36	0,36	0,36	0,37	0,42	0,40	0,40

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

LAMPIRAN 4A**Data TPT Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2008-2017**

No	Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pacitan	3,1	1,32	0,87	2,7	1,16	0,99	1,08	0,97	1,00	0,85
2	Ponorogo	3,73	3,45	3,83	4,37	3,26	3,25	3,66	3,68	3,94	3,76
3	Trenggalek	3,73	3,91	2,15	3,18	3,14	4,04	4,2	2,46	3,97	3,48
4	Tulungagung	3,99	4,54	3,5	3,58	3,18	2,71	2,42	3,95	3,6	2,27
5	Blitar	4,26	3	2,24	3,61	2,86	3,64	3,08	2,79	2,92	2,99
5	Kediri	7,79	5,1	3,75	4,54	4,16	4,65	4,91	5,02	5,44	3,18
7	Malang	6,22	6,35	4,49	4,63	3,79	5,17	4,83	4,95	5,5	4,6
3	Lumajang	4,33	2,24	3,17	2,7	4,7	2,01	2,83	2,6	1,71	2,91
9	Jember	4,48	4,42	2,71	3,95	3,91	3,94	4,64	4,77	5,21	5,16
10	Banyuwangi	5,62	4,05	3,92	3,71	3,4	4,65	7,17	2,55	4,43	3,07
11	Bondowoso	2,93	2,88	1,59	2,84	3,75	2,04	3,72	1,75	1,81	2,09
12	Situbondo	3,89	2,28	3,13	4,74	3,31	3,01	4,15	3,57	3,98	1,49
13	Probolinggo	3,46	2,6	2,02	3,2	1,98	3,3	1,47	2,51	2,29	2,89
14	Pasuruan	6,72	5,03	3,49	4,83	6,43	4,34	4,43	6,41	5,44	4,97
15	Sidoarjo	11,91	10,19	8,35	4,75	5,21	4,12	3,88	6,3	5,57	4,97
16	Mojokerto	7,04	5,54	4,84	4,31	3,42	3,16	3,81	4,05	4,29	5,00
17	Jombang	5,78	6,19	5,27	4,24	6,69	5,59	4,39	6,11	4,95	5,14
18	Nganjuk	6,06	3,98	3,64	4,73	4,22	4,73	3,93	2,1	2,01	3,23
19	Madiun	8,44	6,04	5,55	3,37	4,16	4,63	3,38	6,99	6,69	3,19
20	Magetan	4,37	3,82	2,41	3,16	3,86	2,96	4,28	6,05	6,36	3,8
21	Ngawi	8,18	4,49	4,8	4,06	3,05	4,97	5,61	3,99	5,33	5,76
22	Bojonegoro	5,93	4,52	3,29	4,18	3,51	5,81	3,21	5,01	4,91	3,64
23	Tuban	5,74	4,22	2,86	4,15	4,25	4,3	3,63	3,03	2,78	3,39
24	Lamongan	6,3	4,92	3,62	4,4	4,95	4,93	4,3	4,1	3,88	4,12
25	Gresik	7,5	7,01	7,7	4,36	6,72	4,55	5,06	5,67	4,81	4,54
26	Bangkalan	7,26	5,01	5,79	3,91	5,42	6,78	5,68	5	5,28	4,48
27	Sampang	3,46	1,7	1,77	3,91	1,78	4,68	2,22	2,51	2,77	2,48
28	Pamekasan	3,42	2,18	3,53	2,89	2,3	2,17	2,14	4,26	4,19	3,91
29	Sumenep	3,92	2,27	1,89	3,71	1,19	2,56	1,01	2,07	2	1,83
30	Kota Kediri	11,27	8,32	7,39	4,93	7,85	7,92	7,66	8,46	8,22	4,68
31	Kota Blitar	6,97	8,47	6,66	4,2	3,55	6,17	5,71	3,8	4,81	3,76
32	Kota Malang	11,14	10,44	8,68	5,19	7,68	7,73	7,22	7,28	6,91	7,22
33	KotaProbolinggo	9,93	8,53	6,85	4,66	5,12	4,48	5,16	4,01	3,96	3,42
34	Kota Pasuruan	10,72	7,57	7,23	4,92	4,34	5,41	6,09	5,57	6,35	4,64
35	Kota Mojokerto	12,12	9,3	7,52	5,86	7,32	5,73	4,42	4,88	3,33	3,61
36	Kota Madiun	12,72	11,27	9,52	5,15	6,71	6,57	6,93	5,1	5,12	4,26
37	Kota Surabaya	11,84	8,63	6,48	5,15	5,07	5,32	5,82	7,01	7,29	5,98
38	Kota Batu	8,95	6,88	5,55	4,57	3,41	2,3	2,43	4,29	3,75	2,26
	Jawa Timur	6,42	5,08	4,25	4,16	4,12	4,30	4,19	4,40	4,14	4,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

LAMPIRAN B**Hasil Analisis Regresi Data Panel *Fixed Effect Model***

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 02/11/19 Time: 19:49

Sample: 2008 2017

Periods included: 10

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 380

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.325714	0.734672	12.69372	0.0000
X1	0.246401	0.099926	2.465831	0.0142
X2	0.045054	0.091674	0.491457	0.6234
X3	0.615712	0.084564	7.280987	0.0000

Effects Specification**Cross-section fixed (dummy variables)**

R-squared	0.875908	Mean dependent var	13.61497
Adjusted R-squared	0.861265	S.D. dependent var	5.993146
S.E. of regression	2.232273	Akaike info criterion	4.545536
Sum squared resid	1689.252	Schwarz criterion	4.970660
Log likelihood	-822.6519	Hannan-Quinn criter.	4.714227
F-statistic	59.82085	Durbin-Watson stat	0.380906
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN C**Hasil Uji Chow (*Chow-Test*)**

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	53.332277	(37,339)	0.0000
Cross-section Chi-square	729.598245	37	0.0000

Hasil Uji Hausman (*Hausman-Test*)

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

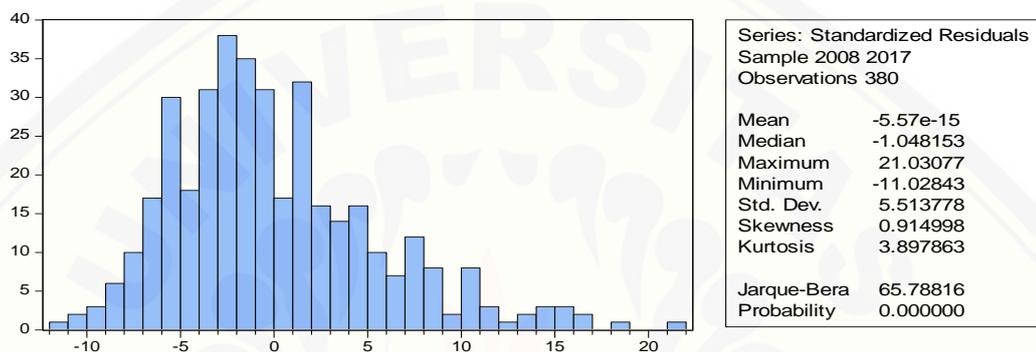
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	54.364615	3	0.0000

LAMPIRAN D

Hasil Uji Multikolinearitas

	Y	X1	X2	X3
Y	1.000000	-0.180938	0.124080	-0.336763
X1	-0.180938	1.000000	-0.123178	0.020819
X2	0.124080	-0.123178	1.000000	-0.011717
X3	-0.336763	0.020819	-0.011717	1.000000

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Heterokedasitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.155250	Prob. F(3,34)	0.9256
Obs*R-squared	0.513509	Prob. Chi-Square(3)	0.9159
Scaled explained SS	0.675829	Prob. Chi-Square(3)	0.8789

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 02/11/19 Time: 20:01

Sample: 1 38

Included observations: 38

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.344130	18.64702	-0.286594	0.7762
X1^2	0.262049	0.408135	0.642064	0.5251
X2^2	28.26383	87.77979	0.321986	0.7494
X3^2	0.089209	0.375359	0.237664	0.8136

R-squared	0.013513	Mean dependent var	6.954529
Adjusted R-squared	-0.073530	S.D. dependent var	12.77977
S.E. of regression	13.24128	Akaike info criterion	8.103856
Sum squared resid	5961.270	Schwarz criterion	8.276234
Log likelihood	-149.9733	Hannan-Quinn criter.	8.165187
F-statistic	0.155250	Durbin-Watson stat	1.331683
Prob(F-statistic)	0.925582		

LAMPIRAN E

Hasil Estimasi Individual Effect di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2017

No	Kabupaten/Kota	Coefficient
1	Kab. Pacitan	6.604806
2	Kab. Ponorogo	0.595927
3	Kab. Trenggalek	3.000202
4	Kab. Tulungagung	-2.484846
5	Kab. Blitar	-0.574795
6	Kab. Kediri	1.648881
7	Kab. Malang	-0.844026
8	Kab. Lumajang	1.352312
9	Kab. Jember	0.178653
10	Kab. Banyuwangi	-2.214619
11	Kab. Bondowoso	5.190229
12	Kab. Situbondo	2.716610
13	Kab. Probolinggo	11.72497
14	Kab. Pasuruan	-0.642701
15	Kab. Sidoarjo	-6.876907
16	Kab. Mojokerto	-1.227669
17	Kab. Jombang	-0.682175
18	Kab. Nganjuk	2.028744
19	Kab. Madiun	1.171977
20	Kab. Magetan	-0.027254
21	Kab. Ngawi	3.836138
22	Kab. Bojonegoro	4.245471
23	Kab. Tuban	6.758840
24	Kab. Lamongan	4.453765
25	Kab. Gresik	1.920513
26	Kab. Bangkalan	12.77026
27	Kab. Sampang	16.93135
28	Kab. Pamekasan	8.132243
29	Kab. Sumenep	11.15422
30	Kota Kediri	-8.047294
31	Kota Blitar	-5.615112
32	Kota Malang	-8.047294
33	Kota Probolinggo	1.691523
34	Kota Pasuruan	-5.032294
35	Kota Mojokerto	-6.817886
36	Kota Madiun	-8.047294
37	Kota Surabaya	-7.673990
38	Kota Batu	-5.147124